

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Kurikulum

1. Pengertian kurikulum

Kurikulum berasal dari bahasan Yunani Kuno yaitu *Curriculae* yang terdiri dari kata “*Curir*” artinya pelari dan “*Curere*” artinya ditempuh atau berpacu. Disini dapat dimaknai sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum dalam arti sempit adalah mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Sedangkan dalam arti luas, kurikulum meliputi semua proses dan pengalaman yang dialami siswa selama kegiatan belajar mengajar. Kurikulum merupakan konsepsi yang dirancang oleh satuan pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik sebagai sebuah pengalaman pendidikan. Kurikulum menjadi dasar terselenggaranya kegiatan dalam belajar mengajar.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum pada dasarnya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.⁷ Berikut pengertian kurikulum menurut para ahli, diantaranya:

- a. Dr. H. Nana Sudjana, Kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan kedalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik.
- b. Crow and Crow, Kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah.
- c. Drs. Cece Wijaya, dkk. Kurikulum dalam arti yang luas yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan didalam sekolah.
- d. Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan, Kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar.
- e. Harsono, Kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik.

Dalam pelaksanaan kurikulum, lembaga pendidikan diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengelola kurikulum secara mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketercapaian visi dan misi lembaga

⁷ Syamsul Maarif, dkk, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 37.

pendidikan, tetapi dengan tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.⁸

Menurut S. Nasution, tafsiran kurikulum dapat kita golongan sebagai berikut: (1) Kurikulum sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Biasanya hasilnya dibentuk dalam sebuah buku yang berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. (2) Kurikulum sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Misalnya, perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah dan lain-lain. (3) Kurikulum sebagai hal yang akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. (4) Kurikulum sebagai pengalaman siswa, yakni apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada setiap peserta didik.⁹

Jadi yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana yang memuat semua proses pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik yang didalamnya berisi mata pelajaran, bahan pelajaran dan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

2. Komponen - komponen kurikulum

Sebagai sebuah sistem kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang eksistensi komponen tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Adapun komponen kurikulum yang meliputi: 1)

⁸ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.

⁹ Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 3.

Tujuan, menurut Sudjana pada hakikatnya tujuan kurikulum adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik.¹⁰

2) Isi/materi, materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam UU Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa "Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional". 3) Metode, merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. 4) Evaluasi, merupakan sebuah penilaian yang dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat pencapaian tujuan kurikulum.

Komponen-komponen tersebut saling berkaitan, keempatnya membentuk seperti siklus kurikulum yang akan terus ada selama pendidikan masih diperlukan dalam kehidupan manusia.

3. Manajemen kurikulum

Istilah manajemen memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang mengartikannya. Manajemen merupakan proses yang khas bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada. Efektif artinya bahwa tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

George R. Terry & Leslie W. Rue menjelaskan bahwa manajemen secara bahasa adalah pengelolaan atau pengaturan, sedangkan menurut istilah

¹⁰ Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah*, 85.

yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan orang lain untuk melaksanakan demi mencapai suatu tujuan.¹¹

Dalam teori Manajemen Islam seseorang yang melakukan kebaikan akan diberi ganjaran didunia dan akhirat. Ganjaran di dunia ini termasuk keuntungan material, dan pengakuan sosial, dan kesejahteraan psikologis dan di hari kemudian berupa kesenangan dan kemakmuran dari Allah. Seseorang juga akan diberi pahala atas niat yang baik.¹²

Mulyasa menegaskan bahwa manajemen kurikulum yang bisa memprediksi gambaran dan keadaan masyarakat pada 10-20 tahun mendatang dapat meningkatkan relevansinya dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.¹³

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan dilaksanakan secara terus-menerus. Adapun dalam proses mendesain kurikulum yang akan digunakan dalam program *homeschooling* yang termasuk dalam jenis pendidikan non formal tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah formal yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, hingga evaluasi.

¹¹ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, terj. G.A. Tico Alu, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 8, 2003), 1.

¹² Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), 188-189.

¹³ Mulyasa, *Manajemen*, 9.

a. Perencanaan kurikulum

Perencanaan adalah hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih jika dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan merupakan bentuk proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan dimasa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah tujuan yang diharapkan.¹⁴

Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Beberapa keputusan harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan kriteria.¹⁵

Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional.

¹⁴ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), 171.

¹⁵ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 21.

Pada pendekatan yang bersifat “*administrative approach*” yakni kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. Semua ide, gagasan, dan inisiatif berasal dari pihak atasan.¹⁶ Adapun sebaliknya pada pendekatan yang bersifat “*grass roots approach*” yaitu dari pihak guru-guru atau sekolah-sekolah secara individual dengan harapan bisa meluas ke sekolah-sekolah lain. Maksudnya adalah kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena melihat kekurangan dalam kurikulum yang berlaku.

Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut, yaitu objektivitas, keterpaduan, manfaat, efisiensi dan efektivitas, kesesuaian, keseimbangan, kemudahan, berkesinambungan, pembakuan, hingga mutu.¹⁷

Dalam perencanaan kurikulum terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya :

- 1) Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia.

¹⁶ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 150.

¹⁷ Ibid., 155-156.

- 2) Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar yang efektif.
- 3) Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan siswa.
- 4) Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat.
- 5) Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkrit, sehingga dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum spesifik.
- 6) Dalam perencanaan kurikulum, harus diadakan evaluasi continue terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum.
- 7) Berbagai jenjang sekolah, dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Untuk itu perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi.¹⁸

Secara umum dalam perencanaan untuk pengembangan kurikulum, haruslah dipertimbangkan atas kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan ruang lingkup pengetahuan. Sebagaimana dikutip nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan komponen-komponen sebagai berikut : 1) Tujuan, tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat.

¹⁸ Ibid., 173-174.

Kedua didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah Negara. 2) Bahan ajar, siswa belajar dalam interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang, alat-alat, dan ide-ide. 3) Strategi belajar, penyusunan bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. 4) Media mengajar, merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar, misalnya audio visual, video visual, televisi, dan computer. 5) Evaluasi pengajaran, hal ini ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. 6) Penyempurnaan pengajaran, mungkin juga dilakukan secara langsung begitu ditetapkan sesuatu informasi umpan balik.¹⁹

Terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan kurikulum, yaitu :

a) Perumusan tujuan institusional

Sumber-sumber penting dalam merumuskan tujuan institusional diantaranya adalah tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Sisdiknas, pandangan atau harapan masyarakat, dan harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

¹⁹ Muhlasin, *Pengembangan Kurikulum Sekolah*, 2011 <http://repository.uin-suka.ac.id/5735/3/BAB%20II.pdf> (diakses tanggal 16 Mei 2021).

b) Pengembangan setiap bidang studi

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tahapan ini meliputi: rumusan tujuan kurikuler, rumusan tujuan pengajaran, penetapan pokok bahasan/sub pokok bahasan, penyusunan garis-garis besar program pengajaran, hingga penyusunan pedoman khusus.

c) Pengembangan program pengajaran dikelas

Dalam tahapan ini, memiliki komponen-komponen sebagai berikut : tujuan, isi/bahan, metode, alat, evaluasi, dan proses.²⁰

b. Pengorganisasian kurikulum

Menurut Heidjarachman Ranupandojo, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan dengan membagi tugas, tanggungjawab, dan wewenang di antara mereka, ditentukan siapa yang menjadi pemimpin, serta saling berintegrasi secara aktif. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.²¹ Yang mencakup membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok; membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut; dan menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Organisasi kurikulum adalah

²⁰ Hafni Ladjid, *Pengembangan Kurikulum*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), 16.

²¹ George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, 73.

pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan.

Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum.²²

Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*), urutan bahan (*sequence*), kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan (*integrated*). Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran merupakan salah satu prinsip yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda.²³

Adapun bentuk-bentuk organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas empat pola, yaitu mata pelajaran terpisah (*Separated Subject Curriculum*), mata pelajaran terhubung (*Correlated*

²² Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung: Rosda, 2015), 58.

²³ Toto Ruhinat, dkk, *Kurikulum & Pembelajaran*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), 88.

Curriculum), kurikulum terpadu (*Integrated Curriculum*), dan kurikulum inti (*Core Curriculum*).²⁴

1) Mata pelajaran terpisah (*Separated Subject Curriculum*)

Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan, karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Nasution menjelaskan bahwa, kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu.

Dalam proses pembelajarannya bentuk kurikulum ini cenderung kurang memerhatikan aktivitas siswa, karena yang dianggap penting adalah penyampaian sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Selain dari itu, bahan pelajaran yang dipelajari siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Bahan pelajaran yang sifatnya informasi sebagian besar akan diperoleh siswa dari buku pelajaran. Siswa akan lebih banyak menghafal dalam mempelajari pengetahuan yang sifatnya terlepas-

²⁴ Ibid., 89.

lepas, sehingga kurang mengembangkan kemampuan dan potensi siswa sebagai individu.²⁵

2) Mata pelajaran terhubung (*Correlated Curriculum*)

Pola kurikulum korelasi, yaitu pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan materi kurikulum atau mata pelajaran yang sejenis atau relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat memperkaya wawasan siswa. Dalam praktik pembelajaran di sekolah, para guru masih berpegang pada latar belakang pendidikannya.

Menurut Nasution²⁶, korelasi dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara diantaranya: (1) Antara dua mata pelajaran diadakan hubungan secara insidental, yakni kalau kebetulan ada pertaliannya dengan mata pelajaran lain. Misalnya, pada pelajaran geografi dapat disinggung soal sejarah, ilmu hewan, dan sebagainya. (2) Terdapat hubungan yang lebih erat apabila suatu pokok atau masalah tertentu diperbincangkan dalam berbagai mata pelajaran, misalnya soal Sawah dibicarakan dalam pelajaran geografi, ilmu tumbuh tumbuhan, pekerjaan tangan, menggambar, bernyanyi, dan sebagainya. Setiap mata pelajaran diberikan pada jam-jam tertentu, jadi berdiri sendiri,

²⁵ Ibid., 90.

²⁶ Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, 64.

tetapi memberi sumbangan masing-masing untuk menyoroti masalah yang dihadapi.

3) Kurikulum terpadu (*Integrated Curriculum*)

Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Integrasi berasal dari kata “integer” yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan keseluruhan. *Integrated curriculum* meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Yang penting bukan hanya bentuk kurikulum ini, tetapi juga tujuannya. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan kita membentuk anak-anak menjadi pribadi yang “intergrated”, yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan sekitarnya. Apa yang diajarkan sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran membantu anak dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan di luar sekolah.²⁷

Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu (integrated) secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat

²⁷ Ibid., 67.

ditiadakan. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional serta dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan kemampuan siswa baik secara proses maupun produk. Bahan pelajaran selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa sebagai individu yang utuh, sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Dalam penerapan kurikulum ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran.²⁸

4) Kurikulum inti (*Core Curriculum*)

Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek lingkungan pun menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum ini. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa core curriculum adalah bagian dari kurikulum integrasi atau kurikulum terpadu, sehingga program

²⁸ Toto Ruhinat, *Kurikulum & Pembelajaran*, 92.

pembelajaran untuk kurikulum ini harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Dalam prosesnya, kurikulum terpadu perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajari siswa agar lebih efektif, efisien, dan bermakna.

Ciri-ciri umum organisasi kurikulum ini adalah sebagai berikut:

(1) Perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif. (2) Pengalaman-pengalaman belajar disusun dalam unit-unit yang luas dan komprehensif berdasarkan tantangan, minat, kebutuhan, dan masalah dari kalangan siswa dan masyarakat sekitarnya. (3) Core pelajaran menggunakan proses demokratis. (4) Banyak dari core program yang dikaitkan dengan bimbingan dan pengajaran. Dalam hal ini, guru mempunyai tanggung jawab bimbingan terhadap the core class. (5) Core program secara lebih luas menggunakan sumber pengajaran yang luas, dan prosedur pengajaran yang lebih fleksibel dan variatif. dan (6) Penggunaan teknik problem solving dalam core program.²⁹

c. Implementasi kurikulum

Pelaksanaan kurikulum berarti proses mewujudkan kurikulum dalam realisasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Implementasi kurikulum diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam

²⁹ Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, 70.

bentuk pembelajaran.³⁰ Implementasi kurikulum merupakan interaksi belajar mengajar yang setidaknya melalui tiga tahap, yaitu³¹:

- 1) Tahap persiapan pembelajaran, adalah kegiatan yang dilakukan guru sebelum melakukan proses pembelajaran.
- 2) Tahap pelaksanaan pembelajaran, adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa mengenai pokok bahasan yang harus disampaikan.
- 3) Tahap penutupan, adalah kegiatan yang dilakukan setelah penyampaian materi.

Dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk secara professional merancang pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan, dan pembentukan kompetensi secara aktif serta menerapkan kriteria keberhasilan.³²

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Adapun pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah: 1) Kepala sekolah sebagai pemimpin. 2) Perilaku seorang administrator. 3) Penyusunan rencana tahunan. 4) Pembinaan organisasi sekolah. 5).

³⁰ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 237-238.

³¹ *Ibid.*, 239.

³² Syafaruddin dan Amiruddin, *Manajemen Kurikulum*, (Medan: Perdana, 2017), 69.

Koordinasi dalam pelaksanaan kurikulum. 6) Kegiatan memimpin rapat kurikulum. 7) Sistem komunikasi dan pembinaan kurikulum. Pada pelaksanaan kurikulum tingkat kelas: 1) Kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar. 2) Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. 3) Kegiatan bimbingan belajar.³³

d. Evaluasi kurikulum

Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektivitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut.

Evaluasi kurikulum didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar-standar kurikulum. Evaluasi kurikulum berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu kurikulum yang diterapkan pada pendidikan, sekaligus untuk menilai efisiensi efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu kurikulum.

Adapun tujuan evaluasi kurikulum adalah mengukur capaian kurikulum, yang sejauh mana kurikulum dapat dilaksanakan.³⁴ Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, yang mana hasil dari evaluasi

³³ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 237-238.

³⁴ Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 184.

tersebut dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya.³⁵

Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Tujuan harus jelas, artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik.
- 2) Realisme, dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat.
- 3) Operasional, artinya harus dapat merumuskan secara spesifik hal-hal yang diukur dan dinilai dalam melaksanakan kegiatan kurikulum yang berarti seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan.
- 4) Klasifikasi, perlunya melihat yang jelas dari pelaksanaan dan keberhasilan suatu program kurikulum.

Terdapat beberapa model dalam evaluasi kurikulum, diantaranya adalah sebagai berikut³⁶ :

³⁵ Ma'as Shobirin, *Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), 33.

³⁶ Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 152.

- a) Evaluasi kurikulum model penelitian : Model ini didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Misalnya, dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak.
- b) Model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan : Model ini yaitu dengan tidak membandingkan kurikulum satu dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Misalnya keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasaan siswa akan tujuan atau kompetensi tersebut.
- c) Model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan : Model ini yaitu seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya atau prosesnya.
- d) Model campuran multifariasi : Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum.
- e) Model *evaluation programs for innovative curriculums* (EPIC) : Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Kubus tersebut memiliki tiga bidang, yang pertama, bidang perilaku (kognitif, afektif, dan psikomotorik). Bidang kedua, pembelajaran (meliputi: organisasi, materi, metode, fasilitas/sarana, pendanaan). Bidang ketiga, kelembagaan (meliputi:

guru, murid, administrator, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat).³⁷

- f) Model CIPP (*concept, input, process, and product*) : Model ini menjelaskan bahwa untuk melakukan penilaian terhadap program pendidikan diperlukan empat macam jenis penilaian, yaitu penilaian konteks, penilaian masukan, penilaian proses, dan penilaian keluaran.
- g) Model ten brink : Model ini terdapat tiga tahap dalam evaluasi kurikulum, yang pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pengumpulan data. Ketiga, tahap penilaian.³⁸
- h) Model pendekatan proses : Karakteristik model ini adalah (1) kriteria yang digunakan untuk evaluasi tidak dikembangkan sebelum pelaksana (evaluator) berada dilapangan. (2) Sangat peduli dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana kurikulum. (3) Evaluasi yang dilakukan terhadap kurikulum merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah. Sehingga masalah yang muncul akan direkam dengan baik dan semua masalah akan dikaji berdasarkan konteksnya.³⁹

B. Homeschooling

1. Pengertian *homeschooling*

Secara etimologis, *homeschooling* adalah sekolah yang diadakan di rumah, namun secara hirarki ia adalah sebuah sekolah alternatif yang menempatkan anak sebagai subyek pendekatan pendidikan secara *at home*.

³⁷ Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum*,...155.

³⁸ Ibid., 157.

³⁹ Ibid., 158.

Dengan pendekatan ini anak merasa nyaman. Mereka bisa belajar sesuai keinginan dan gaya belajar masing-masing, kapan saja dan dimana saja, sebagaimana ia tengah berada di rumahnya sendiri.⁴⁰

Homeschooling merupakan model pendidikan alternative selain pendidikan di bangku sekolah. Dalam *homeschooling* secara mandiri keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak sesuai minat, bakat, dan kebutuhan mereka. *Homeschooling* adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, dimana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak.⁴¹ *Homeschooling* memiliki asumsi dasar bahwa setiap keluarga memiliki hak untuk bersikap kritis terhadap definisi dan sistem eksternal yang di tawarkan kepada keluarga.⁴² Kekhasan dan kekuatan *homeschooling* paling besar adalah *customized education*, yakni pendidikan yang disesuaikan dengan potensi anak dan lingkungan yang ada di sekitar. Dalam *homeschooling* keragaman anak dihargai dan seorang anak tidak dituntut untuk seragam dan serupa.⁴³

Jadi yang dimaksud *homeschooling* adalah sebuah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi seorang anak.

2. Sejarah *homeschooling*

⁴⁰ Arief Rachman, *Homeschooling Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 18.

⁴¹ Maria Magdalena, *Anakku Tidak Mau Sekolah Jangan Takut Cobalah Home Schooling*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 8.

⁴² Sumardiono, *Apa Itu Homeschooling?*, (Jakarta: Panda Median, 2014), 6.

⁴³ *Ibid.*, 26.

Filosofi berdirinya sekolah rumah ditulis oleh John Cadlwel Holt dalam bukunya yang berjudul *How Children Fail* pada tahun 1964. Filosofi tersebut adalah “manusia pada dasarnya makhluk belajar dan senang belajar, kita tidak perlu ditunjukkan bagaimana cara belajar. Yang membunuh kesenangan belajar adalah orang-orang yang berusaha menyelak, mengatur, atau mengontrolnya”. Dipicu oleh filosof tersebut pada tahun 1960-an terjadilah perbincangan dan perdebatan luas mengenai pendidikan sekolah dan sistem sekolah. Sebagai guru dan pengamat anak dalam pendidikan, Holt mengatakan bahwa kegagalan akademis pada siswa tidak ditentukan oleh kurangnya usaha pada sistem sekolah itu sendiri. Setelah pemikirannya tentang kegagalan sistem sekolah mendapat tanggapan luas, Holt sendiri kemudian menerbitkan karyanya yang lain *Instead of Education; Ways to Help People Do Things Better*, pada tahun 1976 dan pada tahun 1977, Holt menerbitkan majalah untuk pendidikan di rumah yang diberi nama: *Growing Without Schooling*.⁴⁴

Pada waktu yang hampir bersamaan, akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, Ray dan Dorothy Moore melakukan penelitian mengenai kecenderungan orang tua menyekolahkan anak lebih awal (*early childhood education*). Penelitian mereka menunjukkan bahwa masuknya anak-anak pada sekolah formal sebelum usia 8-12 tahun bukan hanya tak efektif, tetapi sesungguhnya juga berakibat buruk bagi anak-anak, khususnya anak laki-laki

⁴⁴ Homeschoolingyoo “Sejarah Homeschooling” Desember 2012, <http://homeschoolingyoo.blogspot.co.id/>, (diakses tanggal 28 Oktober 2020).

karena keterlambatan kedewasaan mereka. Serupa dengan Holt, Ray dan Dorothy Moore kemudian menjadi pendukung dan konsultan penting *homeschooling*. Setelah itu, *homeschooling* terus berkembang dengan berbagai alasan. Perkembangan *homeschooling* terus meluas hingga pada tahun 1996, di Amerika sudah lebih dari 1,2 juta anak *homeschooler* dengan pertumbuhan 15% setiap tahunnya. Dan pertumbuhan *homeschooling* juga terus meluas di Eropa dan Asia.⁴⁵

Di Indonesia perkembangan *homeschooling* belum diketahui secara persis karena belum ada penelitian khusus tentang akar perkembangannya. Istilah *homeschooling* merupakan khazanah relative baru di Indonesia. Namun, jika dilihat dari konsep *homeschooling* sebagai pembelajaran yang tidak berlangsung di sekolah formal atau otodidak, maka sekolah rumah sudah tidak merupakan hal baru.⁴⁶

Di negeri kita konsep rumah sudah diterapkan lama oleh sebagian kecil masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat di pondok-pondok pesantren para Kyai secara khusus telah mendidik anak-anaknya sendiri karena merasa lebih mengena dan puas bisa mengajarkan ilmu pada putra sendiri daripada sekadar mempercayakan pada orang lain. Tokoh-tokoh terkenal seperti KH. Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro atau Buya Hamka juga mengembangkan cara belajar dengan sistem persekolahan dirumah ini. Metode ini dijalankan bukan sekedar agar anak didik lulus ujian kemudian mendapat ijazah, namun agar

⁴⁵ *Diyah Yuli Sugiarti*, Mengenal Homeschooling Sebagai Lembaga Pendidikan Alternatif, Jurnal Edukasi Vol. 5 No. 2 (September 2016), 14.

⁴⁶ Homeschoolingyoo “Sejarah Homeschooling” Desember 2012 <http://homeschoolingyoo.blogspot.co.id/>, (diakses tanggal 28 Oktober 2020).

lebih mencintai dan punya semangat yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dipelajari.

3. Tujuan *homeschooling*

Menurut Jamal Ma'mur A. terdapat beberapa alasan orang tua memilih *homeschooling* sebagai pendidikan untuk anaknya, diantaranya⁴⁷:

a. Moral dan *religious reasons*

Sebagian besar orang tua ingin memiliki kesempatan untuk mengajarkan anak-anaknya dengan memilihkan pendidikan yang mengandung unsur nilai-nilai agama dan karakter juga standar moral dalam kurikulum pelajarannya.

b. *Academic reasons*

Dengan *homeschooling* yang memiliki sistem pembelajaran tutorial, yaitu *one-on-one*, orang tua bisa lebih memenuhi kebutuhan anaknya dengan mendukung minat anak, rasa ingin tahu dan setiap anak akan dihargai setiap individu.

c. *Socialization*

Banyak yang beranggapan bahwa anak yang belajar di *homeschooling* tidak bisa bersosialisasi. Perlu diketahui bahwa sosialisasi yang sesungguhnya adalah anak berinteraksi dengan beragam kelompok dan berbeda usia (*vertical socialization*), interaktif anak tidak hanya bisa di ukur dengan teman sekelas atau sebaya di sekolah (*horizontal*

⁴⁷ Jamal Makmur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 68-72.

socialization). Dalam *homeschooling* anak seringkali lebih baik dalam berinteraksi dengan orang-orang beragam usia.

d. Family unity

Melalui *homeschooling*, orang tua dan anak bersama-sama belajar, bereksplorasi, dan menghabiskan waktu bersama. Hal ini akan lebih mempererat hubungan antara anak dan orang tua ataupun saudara kandung.

4. Dasar hukum *homeschooling*

Dasar legalitas *homeschooling* dalam payung hukum nasional adalah:⁴⁸

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 73 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1991 tentang paket A dan B.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132/U/2004 tentang paket C.

Selain itu dasar hukum penyelenggaraan *homeschooling* secara lebih rinci diatur dalam Permendikbud No. 129 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa “sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif

⁴⁸ Diah Yuli Sugiarti, *Mengenal Homeschooling*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 15.

dengan tujuannya agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal”.⁴⁹

5. Kesetaraan *homeschooling*

Dalam UU Sisdiknas dikenal tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Program sekolah rumah tunggal dan majemuk dapat dimasukkan sebagai model pendidikan yang diklasifikasikan sebagai satuan pendidikan informal, berdasarkan UU Sisdiknas, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Dalam hal ini pemerintah tidak mengintervensi dengan membuat peraturan tentang standar isi dan proses pelayanannya. Pemerintah hanya memberikan standar penilaian dan memberikan ijazah bagi lulusan *homeschooling* informal jika ingin disertakan dengan pendidikan jalur formal dan non formal. Sedangkan *homeschooling* komunitas sebagai pendidikan alternatif, dimasukkan sebagai model pendidikan yang diklasifikasikan sebagai satuan pendidikan non formal. Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 4 UU Sisdiknas pendidikan non formal yaitu “Kelompok belajar ditetapkan sebagai salah satu klasifikasi model pendidikan alternative yang merupakan satuan pendidikan non formal”. Maka seperti pada *homeschooling* informal, pada *homeschooling* non formal pemerintah juga tidak mengintervensi dengan membuat peraturan tentang standar isi dan proses pelayanannya.⁵⁰

⁴⁹ Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.

⁵⁰ Diah Y. S, *Mengenal Homeschooling*, 16.

Ketentuan mengenai pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 27, “hasil pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan”. Anak-anak yang belajar melalui *homeschooling* dapat memperoleh ijazah dengan cara mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian kesetaraan terdiri dari ujian Paket A yang setara dengan SD, Paket B yang setara dengan SMP, dan Paket C yang setara dengan SMA, dengan memiliki ijazah Paket C seorang anak dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi manapun yang diinginkan.⁵¹

6. Jenis *homeschooling*

Dalam Permendikbud No. 129 Tahun 2014 pasal 6 dijelaskan terkait *homeschooling* berdasarkan bentuk/jenisnya adalah sebagai berikut⁵²:

a. *Homeschooling* Tunggal dan Majemuk

Homeschooling tunggal adalah *homeschooling* yang diselenggarakan oleh sebuah keluarga tanpa bergabung dengan keluarga lain. *Homeschooling* macam ini biasanya diterapkan karena adanya tujuan atau alasan khusus yang tidak dapat diketahui atau dikompromikan dengan komunitas *homeschooling* lain.

⁵¹ Sumardiono, *Apa Itu Homeschooling?*, 168.

⁵² Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.

Homeschooling majemuk adalah *homeschooling* yang diselenggarakan secara kelompok oleh dua atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu berdasarkan kesamaan bakat dan minat, sementara kegiatan pokoknya tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing.

b. *Homeschooling* Komunitas

Komunitas *homeschooling* adalah gabungan dari beberapa model *homeschooling* majemuk dengan kurikulum yang lebih terstruktur sebagaimana pendidikan formal. Ada silabus, bahan ajar, kegiatan pokok, sarana prasarana, dan jadwal pembelajaran. Sekolah rumah komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non formal sebagai kelompok belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis *homeschooling*, yaitu *homeschooling* tunggal, *homeschooling* majemuk dan komunitas *homeschooling*. Perbedaan dari masing-masing tipe *homeschooling* adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh para *homeschooler*.

7. Kurikulum *homeschooling*

Adapun kurikulum dalam pendidikan non formal memiliki kekhasan tersendiri, yang tentunya berbeda dengan kurikulum pendidikan formal. Untuk mengatur agar kurikulum yang diberikan dalam pendidikan tidak melenceng dari tujuan pendidikan nasional pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam

Pasal 77 L di jelaskan mengenai Struktur Kurikulum Pendidikan Nonformal, yaitu:⁵³ (1) Struktur kurikulum pendidikan nonformal berisi program pengembangan kecakapan hidup yang mencakup ketrampilan fungsional, sikap dan kepribadian professional, dan jiwa wirausaha mandiri, serta kompetensi dalam bidang tertentu. (2) Struktur kurikulum pendidikan nonformal terdiri atas struktur kurikulum satuan pendidikan nonformal; dan program pendidikan nonformal.

Kurikulum pembelajaran *homeschooling* adalah kurikulum yang didesain sendiri, namun tetap mengacu kepada kurikulum nasional. Di Indonesia baru ada kurikulum Diknas, sedangkan diluar negeri banyak pilihan, dari garis yang gratis sampai yang termahal. Kurikulum dalam *homeschooling* tidak dipaksakan harus menginduk Diknas, namun bagi yang akan memakai kurikulum Diknas bukan sebuah masalah.

Mayoritas *homeschoolers* memilih sendiri materi pengajaran dan kurikulumnya. Selanjutnya melakukan penyesuaian dengan kebutuhan anak, keluarga, dan prasyarat pemerintah, diantaranya menggunakan paket kurikulum lengkap yang dibeli dari penyedia kurikulum. Dan sekitar 3% menggunakan materi dari partner *homeschooling* yang dijalankan oleh lembaga setempat.

Adapun dengan sistem pendidikannya, disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarga, manajemennya memakai kurikulum terbuka yang bisa dipilih. Sedangkan jadwal atau kegiatan belajarnya bersifat fleksibel sesuai

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 77 L.

dengan kesepakatan bersama, peran orang tua sangat dilibatkan bahkan sebagai penentu keberhasilan, serta model belajarnya tergantung komitmen dan kreativitas orang tua/siswa dalam mendesain sebuah kebutuhan.⁵⁴

Terkait dengan penilaian hasil belajar peserta didik yang menempuh pendidikan nonformal seperti halnya *homeschooling* diperjelas dalam Permendikbud No. 129 Tahun 2014, yakni:⁵⁵

- a. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik sekolah rumah yang akan mengikuti UN/UNPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik.
- c. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik Sekolah rumah dilakukan oleh:
 - a. Pendidik, penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar.
 - b. Satuan pendidikan nonformal atau satuan pendidikan formal, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan nonformal atau satuan pendidikan formal bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Penilaian oleh pemerintah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui UN/UNPK yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁵⁴ Diyah Y. S., *Mengenal Homeschooling*, 13-22.

⁵⁵ Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.

C. Mutu Pendidikan

1. Pengertian mutu pendidikan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Mutu” berarti Karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).⁵⁶ Pendidikan adalah perbuatan mendidik. Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan secara etimologi adalah kualitas perbuatan mendidik. Mendidik disini adalah interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas.

Adapun menurut Joremo S. A. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai.⁵⁷

Menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, mutu pendidikan adalah kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan sebaik mungkin guna meningkatkan kemampuan dalam belajar.

⁵⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 788.

⁵⁷ Oremo S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 85.

Disini makna mutu pendidikan tidak hanya berbicara soal hasil, tetapi juga proses dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan dikatakan bermutu apabila proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan hasil yang didapat memuaskan. Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar bila guru dan murid bisa berkomunikasi dengan baik, lingkungan belajar yang nyaman, serta didukung sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar ini.

Mutu pendidikan bisa dilihat dari hasil, mengacu pada prestasi yang diperoleh murid maupun sekolah untuk kurun waktu tertentu. Namun selain itu, kemampuan sekolah untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik juga menunjukkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Adapun kriteria pendidikan bermutu dilihat dari sudut pandang Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah yang mampu mendidik muridnya berbudi pekerti luhur, bermoral, bertaqwa, dan berwawasan nasional kebangsaan.
- b. Sekolah yang mampu menanamkan ketrampilan dasar untuk mencapai prestasi akademik berdasarkan kurikulum nasional serta mengembangkan bakat dan minat individu melalui prestasi non akademik.
- c. Sekolah yang mampu menanamkan wawasan lingkungan dan sistem nilai yang merefleksi sosial, budaya, religius, yang bermutu konsep diri atau percaya diri.
- d. Sekolah yang mampu menjalin hubungan harmonis antara kepala sekolah dengan adminitratif dan akademik.

- e. Sekolah yang mampu menciptakan suasana bersemangat dan penuh motivasi pada semua komunitas sekolah.
- f. Sekolah yang mampu mengembangkan kreatifitas guru dalam mengajar secara berkelanjutan melalui evaluasi, perubahan, dan perbaikan pengajaran.
- g. Sekolah yang mampu membangkitkan semangat murid untuk berpartisipasi mengembangkan potensi akademik maupun non akademik.

2. Karakteristik sekolah yang bermutu

Untuk menetapkan kriteria pendidikan yang bermutu terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Menurut Hoy Forgusen ada dua, namun menurut Robbi ada tiga pendekatan, yaitu:

- a.** Pendekatan pencapaian tujuan, Maksudnya bahwa dalam menentukan kriteria pendidikan, difokuskan pada tujuan yang akan dicapai.
- b.** Pendekatan proses, Keefektifan sekolah tidak hanya dilihat dari tingkatan pencapaian tujuan tetapi difokuskan pada proses dan kondisinya yang disebut karakteristik sekolah, yang berupa karakteristik internal dan karakteristik eksternal.
- c.** Pendekatan respon lingkungan, menurut pendekatan ini sekolah dikatakan sukses jika tujuannya dinyatakan secara eksplisit, ditampakkan secara rasional dan bijaksana, diberi kesan teratur dan terkontrol, mempunyai

struktur dan prosedur yang pantas, memberi pertanggung jawaban dan penampilan tindakan yang meyakinkan.⁵⁸

3. Faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan mutu pada setiap satuan pendidikan diarahkan dalam bentuk upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Umaedi, peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.⁵⁹ Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, diantaranya dengan pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan.

Mutu produk pendidikan akan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- a. Tenaga kependidikan
- b. Peserta didik
- c. Proses pembelajaran
- d. Sarana pendidikan
- e. Keuangan

⁵⁸ *Mubashyiroh*, Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Madrasah Unggulan di MTs Negeri Lamongan, Skripsi UIN Malang, (2007), 44-46.

⁵⁹ Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2000)

f. Hubungan dengan masyarakat.⁶⁰

Dari paparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan efektif untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan output yang berkualitas.

⁶⁰ Suryadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 12.